

Bidang Unggulan UB: Good Governance

Kode / Rumpun : 594 / Ilmu Administrasi

**Laporan Akhir
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (U)**



**Rekayasa Model Anti-Korupsi
Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah**

Tahun ke-1 dari rencana 3 tahun

Ketua/Anggota Tim

Dr. Imam Hanafi S.Sos M.Si M.Si	Ketua Peneliti	0002106904
Dr. Mohammad Khusaini SE., M.Si. MA	Anggota Peneliti	0011017101
Dr. Tjahjanudin Domai, MS	Anggota Peneliti	0022125306

Dibiayai oleh :

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Melalui DIPA Universitas Brawijaya
 Nomor : DIPA-023.04.2.414989/2013, Tanggal 5 Desember 2012, dan berdasarkan
 SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor : 295/SK/2013 tanggal 12 Juni 2013

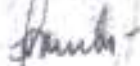
Universitas Brawijaya
 Agustus, 2013

Halaman Pengesahan

Penelitian : Rekayasa Model Anti-Korupsi Dalam
Pelaksana : Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah
Lengkap : Good Governance
DN : Dr. Imam Hanafi S.Sos M.Si
 : 0002106904
 : Asisten Ahli
 : Ilmu Administrasi Publik
 : 082329990999
 : @gronas@gmail.com; imambhanafi@ub.ac.id
 :
 : Dr.Mohammad Khusaini SE M.Si MA
 : 0011017101
 : Universitas Brawijaya
 :
 : Dr Tjahjanulin Domai MS
 : 0022125306
 : Universitas Brawijaya
 : Jl MT Haryono 163 Malang
 :
 : Tahun ke-1 dari rencana 3 tahun
 : Rp 150.000.000,-
 : Rp 450.000.000,-

Malang, 07 Agustus 2013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya



Prof. Dr. Bambang Supriono, MS
NIP. 1961 0905 198601 1 002

Kespa



(Dr. Imam Hanafi, S.Sos M.Si)
NIP. 19691002 199802 1 001



Ringkasan

Masyarakat, korporasi dan pemerintah mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan. Gangguan signifikan untuk upaya peningkatan kesejahteraan adalah tata kelola yang baik (*good governance*). *Governance* adalah intervensi otoritas negara melalui kebijakan publik dan partisipasi aktif masyarakat dan korporasi. Intervensi dan partisipasi penting untuk keadilan distribusi pemanfaatan optimal sumber daya alam sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada suatu sisi adalah bagian dari pemerintah yang merupakan bagian otoritas. Pada sisi lain BUMD adalah korporasi yang harus memperoleh keuntungan. Struktur dan fungsional ini menjadi salah satu faktor kegagalan BUMD. Perihal lain adalah tingkat hukum yang belum memadai, intervensi politik dan faktor budaya yang melingkupinya.

Penelitian ini merencanakan model anti-korupsi dalam pengelolaan BUMD. Model yang disusun diharapkan akan memandu BUMD untuk tata kelola yang baik. Penelitian terutama menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian juga memperhatikan paradigma naturalistik dengan pendekatan kualitatif melalui *grounded research*. Metode rekayasa model didasarkan pada cara berfikir sistem menggunakan perangkat lunak Powersim Constructor.

Penelitian awal menunjukkan bahwa korupsi di BUMD telah berlangsung secara sistemik. Korupsi diawali dari aspek kultural termasuk pemakluman atas tindakan korupsi, kemudian peraturan perundangan yang memberikan peluang korupsi, penegakan peraturan perundangan yang korup dan lemah pencegahan yang lemah. Korupsi bisa dicegah dengan menegakkan peraturan perundangan yang sesuai dengan kodrat manusiawiah masyarakat.

Keywords: Rekayasa, Model, Anti-Korupsi, BUMD.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, I. 1996. Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan. Kalimasahada, Malang.
- Arifin, Donny. 2002. Korupsi di sektor pelayanan Publik dalam Basyaib, H., et.al. (ed.) 2002, Mencuri Uang Rakyat: 16 kajian Korupsi di Indonesia, Buku 2. Yayasan Aksara dan Patnership for Good Governance Reform, Jakarta.
- Bagus Aditya Graydison & Meita Santi Budiani. Dampak Perilaku Korupsi Ditinjau dari Stres pada Keluarga di Kabupaten Lombok Timur Selong, NTB
- Baswir Revrisond. 1993, Ekonomi, Manusia dan Etika, Kumpulan Esai-esai Terpilih, BPFE, Yogyakarta.
- Baswir Revrisond. 1996. Ekonomi Politik Kesenjangan, Konglomerasi, dan Korupsi di Indonesia, dalam buku Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat. BPFE, Yogyakarta.
- Baswir, Revrisond, 2000, Penghapusan Dana Nonbujeter, Majalah Berita Mingguan Forum Keadilan No. 19/2000, Jakarta.
- Baswir, Revrisond, 2000. Penjarahan Daerah dan UU NO. 25/1999, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif WACANA, Yogyakarta: Insistpress
- Baswir, Revrisond, 2001. Transparansi BUMN, Harian Umum BERNAS, Yogyakarta.
- Baswir, Revrisond, Dinamika Korupsi di Indonesia: Dalam Perspektif Struktural.
- Basyaib, H., Holloway R., dan Makarim NA. (ed.) 2002. Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia: Buku 3. Yayasan Aksara dan Patnership for Good Governance Reform, Jakarta.
- Bernardi R.A. 1994, Fraud Detection : The Effect of Client Integrity and Competence and Auditor Cognitive Style. Auditing : A Journal of Practice and Theory 13 (Supplement), hal. 68-84
- Davidson, P.L 1994. User's Guide and Reference Powersim: The Complete Software Tool for Dynamic Simulation. Modelldata. Bergen.
- Djojomartono, M. 2000. Pengantar Umum Analisa Sistem. IPB, Bogor
- Eriyatno. 1999. Ilmu Sistem. IPB. Bogor.
- Greenberger, M. Crenson, M.A. and Crissey, B.L. 1976. Models in The Policy Process: Public Decision Making in The Computer Era. Russell Sage, New York.
- Halim, Abdul. 2003. Bunga Rampai Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN, Jogjakarta.
- Harian Sumatera Ekspres, Konvensi Anti Korupsi perlu Diratifikasi, Selasa 13 Desember 2005
- Harian Sumatera Ekspres, Kuburan Pemberantasan Korupsi, tanggal 22 Februari 2006
- Harian Sumatera Ekspres. SBY: KPK jangan ragu (Ambil alih kasus korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan), tanggal 8 Maret 2006
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1994, Korupsi di Indonesia: Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hosmer, D.W, and Lemeshow, S. 1989. Applied Logistic Regression. John Wiley and Sons, New York.

- <http://news.okezone.com/read/2009/07/11/1/237851/hukuman-uang-pengganti-korupsi-dihapus-pemerintah>, diakses tanggal 8 Maret 2010
- <http://www.antikorupsi.org>, Pengadilan masih milik Koruptor, diakses tanggal 2 Mei 2006.
- <http://www.inilah.com/news/read/politik/2009/12/02/198522/kpk-akibat-korupsi-negara-rugi-rp-689-miliar/>, diakses tanggal 7 Maret 2010
- <http://www.solopos.com/2009/channel/nasional/kerugian-negara-capai-rp-689-miliar-akibat-korupsi-pengadaan-barang-jasa-9334>, diakses tanggal 7 Maret 2010
- International Council on Human Rights Policy & Transparency International. *Corruption and Human Rights: Making the Connection*, © 2009 International Council on Human Rights Policy. 48, *chemin du Grand-Montfleury, P. O. Box 147, 1290 Versoix, Switzerland*
- Isa Wahyudi dan Sopanah. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Korupsi APBD di Malang Raya*.
- Islamy, M.I. 1992. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Jawa Pos, Indonesia Tak Lagi Terkorup di Asia, Rabu 14 Maret 2007
- Kartono, Kartini. 1983. *Patologi Sosial*. Edisi Baru. CV. Rajawali Press. Jakarta.
- Khudori, Politik Anggaran Publik. *Pikiran Rakyat*, Rabu, 04 Februari 2004
- Klitgaard, et.al. 2002. *Penantun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia & Patnership for Governance in Indonesia, Jakarta
- Klitgaard, Robert E. *Robert Klitgaard*. 1991. *Controlling Corruption*. Penerbit University of California Press.
- Klitgard, Robert. 1998. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kroelinger M. 2001. *Sampling and Inferential Statistics*. Paper.
- Lincoln, Y.S. and Guba. E.G. 1985. *Naturalistic Inquiry*. 1st ed. Sage, Beverly Hills. h. 110-346.
- Lofland, J and L.H. Lofland. 1984. *Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*. Wadsworth Publishing. Belmont. h. 131-137.
- Lubis, Mochtar dan James C. Scott. 1985. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES
- Lubis, Mochtar dan James C. Scott. 1990. *Korupsi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Lubis, Mochtar dan James C. Scott. 1992. *Korupsi Politik*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Malang Corruption Watch. 2004. *Laporan Investigasi kasus APBD Malang Raya, tidak diterbitkan*.
- Manetsch, T.J. 1977. *System Analys and Simulation With Application to Economic and Social System Part I*. 3rd Edition. Michigan State Univ. Michigan.
- Mardiasmo, 2003, *Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Layanan Publik*, *Majalah Swara MEP*, Vol. 3 No. 8 Maret, MEP UGM, Jogjakarta.
- Marshall, C. and Rossman, G.B. 1989. *Designing Qualitative Research*. Sage. Newbury Park. h. 79-120.
- Meter, D.S van, and Horn, C.E. van. 1989. *Public Policy Analysis*. Sage. London.
- Miles, M.B, and Huberman, A.M. 1992. *Qualitative Data Analysis, A Sourcebook of New Methods*. Sage. Baverly Hills.
- Moleong, L.J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muhadjir, N. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin. Yogyakarta.

- Abdhammadi, Aminullah, E. dan Soesilo, B. 2001. *Analisis Sistem Dinamis*. UMJ. Jakarta.
- Asmussen, S. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito, Bandung. h. 130.
- Bassons, W. 1995. *Public Policy, An Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis*. Edward Elgar, Cheltenham.
- Changpaichit, Pasuk dan Sungsidh Piriyanangsan, 1994. *Corruption and Democracy in Thailand*. Bangkok: Silkworm Books
- Cooper, Jeremy, 1999. *Pengembangan Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Pusat Gravity
- Cooper, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- PowerSim Manual 2005. <http://www.powersim.com>
- Prakoso, Djoko. et.al.1987, *Kejahatan-Kejahatan yang membahayakan dan Merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta
- Rais, H.M.A. 2002. *Bahaya Syahwat Kekuasaan*, Adil 14/11/2002.
- Republik Indonesia, 2001, *Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*, Citra Umbara, Bandung.
- Roberts, N. 1983. *Introduction to Computer Simulation: A System Dynamics Modelling Approach*. Addison Wesley Publishing, Massachusetts.
- Romli Atmasasmita, 1998, *Perbandingan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Saptaatmaja, TS. *Korupsi dan Hipokrisi*, Kompas, Rabu, 8 September 2004
- Sarundayang, 1997. *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*. Sinar Harapan, Jakarta.
- Schlegel, S.A. 1984. *Penelitian Grounded dalam Ilmu Sosial*. Fisipol UNS, Surakarta. h. 41-45.
- Paul SiniaEloE. Paul. *Korupsi: Sebab dan Akibat Sunday*. PIARR NTT, diupload December 2, 2007
- Soeprapto, R.R. 2000. *Evaluasi Kebijakan Publik: Suatu Pendekatan*. UM Malang.
- Sopannah & Wahyudi, Isa, 2004, *Analisa Anggaran Publik : Panduan TOT*. Malang Corruption Watch (MCW) dan Yappika, Jakarta
- Strauss, A. and Corbin, J. 1990. *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory, Procedures, and Techniques*. Sage, Newbury Park. h. 57-175.
- Sulistyantoro, HT., *Etika Kristen dalam Menyikapi Korupsi*, Kompas, Senin, 2 Agustus 2004
- Tunggal I.S. dan Tunggal A.W, 2000, *Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensik*, Harvarindo, Jakarta.
- Weimer, D.A, and Vining, A.R. 1989. *Policy Analysis Concepts and Practice*. Prentice-Hall, New Jersey.
- Wildavsky, M. and C. Browne, C. 1984. *Public Administration*, Charles Cribners's Son, New York.